

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI KABUPATEN TERTINGGAL

¹ Alifia Hasyimi, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lampung, Indonesia

² Muhammad Irfan Affandi, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Indonesia

³ Fembriarti Erry Prasmatiwi, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 14 November 2023;

Revision: 22 November 2023;

Accepted: 25 November 2023;

Kata Kunci:

Sektor unggulan, PDRB, Analisis LQ, dan Analisis Shift-Share

Abstract

This research aims to determine the leading sectors of the economy and the performance of the leading sectors in Pesisir Barat Regency. Research uses secondary data. Secondary data used in this research is Gross Regional Domestic Product (GRDP) based on constant prices for Lampung Province and Pesisir Barat Regency from 2018 to 2022. The analytical tools used in this research are *Location Quotient (LQ)* analysis and *Shift-Share analysis*.

The research results show that of the 17 business sectors in 2018-2022, there are 9 economic base sectors in Pesisir Barat Regency with an LQ value >1, namely the agriculture, forestry and fisheries sector; wholesale trade and vehicle repair sector, information and communications sector, real estate sector, corporate services, administration sector, educational services sector, health services sector and social activities and other service sectors. The economic growth of Lampung Province from 2018 to 2022 influenced the increase in PDRB of Pesisir Barat Regency by up to 10.76 percent with a total of IDR 316.72 billion with the agriculture, forestry and fisheries sector contributing the highest with a total contribution of IDR 159.86 billion

Abstrak

Penelitian ini bermaksud guna mengetahui sektor unggulan perekonomian maupun kinerja sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian mempergunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 hingga tahun 2022. Alat analisis dalam penelitian ini, yakni analisis *location quotient (LQ)* dan analisis *shift-share*.

Hasil penelitian memperlihatkan bila dari 17 sektor lapangan usaha 2018-2022 terdapat 9 sektor basis perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai LQ >1, yakni sektor pertanian kehutanan maupun perikanan; sektor perdagangan besar maupun reparasi kendaraan, sektor informasi maupun komunikasi, sektor real estate, jasa perusahaan, sektor administrasi, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan maupun kegiatan sosial dan sektor jasa lain. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dari tahun 2018 hingga tahun 2022 memengaruhi lonjakan PDRB Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan 10,76 persen dengan jumlah Rp 316,72 miliar rupiah dengan sektor pertanian kehutanan dan perikanan yang berkontribusi tertinggi dengan jumlah kontribusi sejumlah Rp159,86 miliar.

* *Corresponding Author.*

Muhammad Irfan Affandi, e-mail: irfan.affandi@fp.unila.ac.id

PENDAHULUAN

Membangun wilayah secara merata sebagai salah satu tantangan suatu negara berkembang, termasuk Negara Republik Indonesia. Kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi satu dari sekian banyak permasalahan yang sedang Indonesia hadapi, begitu juga dengan masalah wilayah maju dan wilayah tertinggal. Wilayah pedesaan yang terpencil dan terisolasi sering kali menjadi wilayah dengan status kabupaten tertinggal di Indonesia. Keterbatasan sumber daya, akses yang buruk, dan kurangnya perhatian pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor-faktor penyebab kabupaten-kabupaten tersebut tertinggal. Peraturan Presiden No. 3 tahun 2020 mengenai penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, memperjelas bila kabupaten tertinggal merupakan wilayah dengan masyarakat yang mengalami kesulitan untuk berkembang dibanding wilayah lainnya dalam skala nasional.

Sesuai ketentuan atau syarat penentuan daerah tertinggal oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mempergunakan pendekatan berdasar beberapa kriteria mendasar, seperti ekonomi masyarakat; sumber daya manusia; infrastruktur; kemampuan finansial daerah; aksesibilitas; serta karakteristik daerah. Tidak sama dengan penanganan kemiskinan, pembangunan daerah tertinggal bukan sekadar terbagi atas pembangunan aspek perekonomian saja, tetapi memengaruhi aspek sosial budaya maupun keamanan. Sesuai kriteria atau syarat kabupaten tertinggal yang telah peneliti sampaikan, Kabupaten Pesisir Barat tergolong sebagai wilayah berkategori kabupaten tertinggal yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015.

Sektor unggulan menjadi sektor ekonomi yang berperan vital guna menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran sektor-sektor unggulan yang terdapat pada suatu wilayah dapat menjadi penopang perekonomian disuatu wilayah tersebut. Sektor unggulan dapat dikatakan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan angka pengangguran dan berdampak juga terhadap pertumbuhan GDP (*gross domestic bruto*). Menurut Badan Pusat Statistik (2020), terdapat alat untuk mentafsirkan atribut dalam pertumbuhan ekonomi: yang bisa terlihat melalui besar-kecilnya nilai produk domestik regional bruto (PDRB), lalu dianalisis sedemikian rupa sehingga muncul sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan atau sektor basis ekonomi di wilayah itu. Wahyuningtyas dkk (2018) menyampaikan bila pergerakan ekonomi secara universal terpengaruh oleh peranan sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia yang bukan sekadar beracuan pada geografis, tetapi sektor yang seluruhnya tersebar di bermacam saluran ekonomi. Data yang terdapat pada PDRB dapat dimanfaatkan agar bisa mengetahui potensi ekonomi di suatu wilayah, selanjutnya dipakai sebagai bahan acuan dalam mengelola sumber daya alam/manusia di suatu daerah.

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 menentukan Kabupaten Pesisir Barat ialah kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung tahun 2020 sampai tahun 2024. Berdasar pada UU Nomor 22 Tahun 2012, Kabupaten Pesisir Barat memisahkan diri dari Kabupaten Lampung Barat. Misi yang diemban, yaitu guna membangun daerah. Penanggulangan pembangunan daerah tertinggal terbagi atas membangun di aspek ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan. Langkah yang dilaksanakan Kabupaten Pesisir Barat guna mengubah status kabupaten tertinggal, yakni mengidentifikasi sektor yang bisa dijadikan sebagai sektor unggulan supaya bisa terentaskan dari status kabupaten tertinggal. Mengidentifikasi sektor potensial disuatu wilayah dilakukan dengan tujuan agar pengembangan ekonomi daerah dapat difokuskan pada sektor tersebut dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka dari itu tujuan dari studi ini ialah guna memastikan sektor apa yang bisa dijadikan sebagai sektor unggulan, serta kinerja sektor unggulan perekonomian di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti mempergunakan metode kualitatif dan data sekunder. Data sekunder, yakni data yang peneliti dapatkan dari instansi pemerintahan maupun instansi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sugiyono (2018) memaparkan bahwasanya data sekunder bukan data yang didapat secara langsung melalui narasumber, tetapi didapat lewat dokumen. Data produk domestik regional bruto berdasar pada harga konstan Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022 ialah data sekunder yang dipakai pada penilitan ini.

Penggunaan metode analisis data dimaksudkan agar bisa menjawab maksud/tujuan yang sudah peneliti cantumkan dalam penelitian ini. Metode analisis yang dimaksud, yaitu *locaton quotient* (LQ) maupun *shift-share* (SS). Analisis *location quotient* (LQ) berguna untuk memastikan sektor yang termasuk sebagai sektor basis wilayah Kabupaten Pesisir Barat terhadap pembentukan PDRB. Analisis LQ mempergunakan pendekatan PDRB terlaksana dengan melakukan perbandingan antara PDRB sektor ekonomi di tingkat Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 sampai tahun 2022 terhadap PDRB total wilayah dengan pangsa relatif PDRB sektor perekonomian tingkat provinsi terhadap PDRB total Provinsi Lampung tahun 2018 hingga 2022.

Analisis Location Quotient

Data PDRB sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dianalisis mempergunakan *location quotient* (LQ) dengan rumus seperti pemaparan di bawah ini (Tarigan, 2005).

$$LQ = \frac{x_i}{y_i} / \frac{X_i}{Y_i}$$

Penjelasan:

LQ: Indeks *location quotient*

x_i : PDRB sektor pekonomian Kabupaten Pesisir Barat

y_i : PDRB total Kabupaten Pesisir Barat

X_i : PDRB sektor Perekonomian Provinsi Lampung

Y_i : PDRB total Provinsi Lampung

Ketentuan:

- 1) $LQ \geq 1$: sektor perekonomian diklasifikasikan sebagai sektor basis
- 2) $LQ < 1$: sektor perekonomian diklasifikasikan sebagai sektor nonbasis.
- 3) $LQ = 1$: sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat sama dengan Provinsi Lampung

Analisis Shift Share

Shift share berguna agar bisa memastikan nilai *national shere*, *proportional shift* maupun *differential shift* dari masing-masing sektor perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Rumus yang dipergunakan, yaitu:

$$\Delta E_{ri} = (N_{ri} + P_{ri} + D_{ri})$$

$$N_{ri} = \left(\frac{\Delta EN_t}{EN_{t-n}} \right) E_{ri_{t-n}}$$

$$P_{ri} = \left(\frac{\Delta EN_{i_t}}{EN_{i_{t-n}}} - \frac{\Delta EN_t}{EN_{t-n}} \right) E_{ri_{t-n}}$$

$$D_{ri} = \left(\frac{\Delta E_{ri_t}}{E_{ri_{t-n}}} - \frac{\Delta EN_{i_t}}{EN_{i_{t-n}}} \right) E_{ri_{t-n}}$$

Penjelasan:

Δ = Perubahan (mengurangi tahun akhir dengan tahun awal)

EN = Total PDRB Provinsi Lampung

E_r = Total PDRB Kabupaten Pesisir Barat

- Nr = Komponen *national share*
 Pr = Komponen *proportional shift*
 Dr = Komponen *differential shift*
 r = PDRB Kabupaten Pesisir Barat
 N = PDRB Provinsi Lampung
 i = Sektor Terkait
 t-n = Tahun Awal
 t = Tahun Akhir

Kriteria:

- 1) PPij di bawah 0 Pertumbuhan PDRB sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat Lambat.
- 2) PPij di atas 0 Pertumbuhan PDRB sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat cepat.
- 3) PPWij di atas 0 Sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat berdaya saing baik bila membandingkannya dengan Provinsi Lampung.
- 4) PPWij di bawah 0 Sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat tidak berdaya saing dengan baik bila membandingkannya dengan Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran sektor perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat bisa terlihat melalui seberapa besar kontribusi sektor perekonomian terhadap pendapatan daerah, untuk itu penelitian ini perlu dilakukan. Nilai LQ di atas satu mengartikan bila sektor perekonomian itu ialah sektor basis guna memperoleh penjelasan terkait penentuan sektor unggulan sebagai *leading sector* suatu aktivitas perekonomian. Nilai LQ diperoleh dari data PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung periode 2018 hingga 2022. Peran dari masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat dilihat mempergunakan metode *location quotient* (LQ), seperti uraian di bawah ini.

Sesuai pemaparan di atas, bisa terlihat bila ada sembilan sektor ekonomi yang bernilai LQ di atas satu. Sektor ekonomi itu, seperti pertanian, kehutanan, maupun perikanan, sektor perdagangan besar maupun reparasi kendaraan, sektor informasi maupun komunikasi, real estate, jasa perusahaan, administrasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan maupun aktivitas sosial, serta jasa lain. Melalui pemaparan di atas, memperjelas bila selama tahun 2018 sampai tahun 2022, tidak mengalami perubahan peran sektor ekonomi terhadap sektor basis maupun nonbasis, serta nilai LQ yang diperoleh untuk masing-masing sektor pun tidak berubah secara signifikan

Sektor pertanian, kehutanan maupun perikanan di Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 merupakan sektor basis dengan nilai LG tertinggi dengan rerata 1,78. Sesuai uraian di atas, nilai LQ sektor pertanian di Kabupaten Pesisir Barat fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022, namun tidak begitu signifikan. Beragamnya nilai LQ dikarenakan keterlibatan sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat pun kerap berubah-ubah di tiap tahunnya. Penggunaan analisis *shift share* bermaksud guna menemukan perubahan sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat, maka bisa melihat kinerja antarsektor itu dalam membentuk PDRB di Kabupaten Pesisir Barat. Penghitungan analisis *shift share* melalui perbandingan antara data PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat dengan Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2022. Hasil analisis *shift-share* PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung tertera di Tabel 2.

Tabel 1.
Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	PDRB (17 Kategori)	LQ Kabupaten - Provinsi					Rata-Rata	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Pertanian, Kehutanan, maupun Perikanan	1,75	2,21	1,72	1,73	1,67	1,78	Basis
2	Pertambangan maupun Penggalian	0,93	1,22	0,99	0,99	1,11	1,00	Nonbasis
3	Industri Pengolahan	0,27	0,32	0,23	0,22	0,22	0,26	Nonbasis
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,09	0,13	0,11	0,12	0,12	0,10	Nonbasis
5	Pengadaan Air	0,48	0,59	0,46	0,46	0,46	0,49	Nonbasis
6	Konstruksi	0,61	0,94	0,74	0,76	0,79	0,71	Nonbasis
7	Perdagangan Besar maupun Reparasi Kendaraan	1,01	1,31	1,05	1,04	1,07	1,07	Basis
8	Transportasi maupun Pergudangan	0,20	0,25	0,20	0,21	0,21	0,21	Nonbasis
9	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,62	1,27	1,25	1,30	1,24	Basis
10	Penyediaan Akomodasi maupun Makan Minum	0,49	0,63	0,47	0,49	0,51	0,51	Nonbasis
11	Jasa Keuangan	0,69	0,88	0,66	0,68	0,69	0,71	Nonbasis
12	Real Estate	1,23	1,64	1,26	1,29	1,35	1,32	Basis
13	Jasa Perusahaan	0,97	1,29	1,00	1,01	0,91	1,01	Basis
14	Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	1,52	0,20	1,51	1,51	1,65	1,33	Basis
15	Jasa Pendidikan	1,24	1,59	1,24	1,27	1,32	1,30	Basis
16	Jasa Kesehatan maupun Aktivitas Sosial	1,14	1,47	1,13	1,14	1,19	1,18	Basis
17	Jasa lain	1,16	1,47	1,15	1,17	1,18	1,20	Basis

Sumber: olah data tahun 2023

Tabel 2.
Analisis Shift-Share (SS) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	PDRB (17 Kategori)	PNij Prov Lampung (10,76%)		PPij		PPW	
		Miliar	Miliar	%	Miliar	%	
1	Pertanian, Kehutanan, maupun Perikanan	159,86	-105,95	-7,13	-93,85	-6,31	
2	Pertambangan dan Penggalian	17,34	-33,42	-20,73	25,69	15,94	
3	Industri Pengolahan	15,83	-4,42	-3,01	-28,04	-19,06	
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,05	-0,01	-3,15	0,18	40,12	
5	Pengadaan Air	0,15	0,17	11,93	-0,10	-7,08	
6	Konstruksi	19,00	8,08	4,57	56,48	31,98	
7	Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	38,93	51,51	14,23	18,51	5,11	
8	Transportasi dan Pergudangan	3,27	4,49	14,77	1,50	4,95	
9	Informasi dan Komunikasi	5,00	1,93	4,15	9,54	20,51	
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,41	9,44	13,71	2,46	3,57	
11	Jasa Keuangan	4,50	-2,43	-5,80	-0,56	-1,35	
12	Real Estate	12,37	-8,11	-7,04	10,46	9,09	
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	10,91	-0,37	-9,29	
14	Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	14,71	2,66	1,94	11,86	8,67	
15	Jasa Pendidikan	11,04	6,47	6,31	6,45	6,28	
16	Jasa Kesehatan maupun aktivitas Sosial	3,48	3,95	12,20	1,30	4,01	
17	Jasa lainnya	3,36	4,94	15,82	0,26	0,85	

Sumber: olah data tahun 2023

Sesuai Tabel 2, pertumbuhan sektor perekonomian di Provinsi Lampung secara menyeluruh sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mampu meningkatkan PDRB Kabupaten Pesisir Barat hingga 10,76% sejumlah Rp316,72 miliar. Sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat yang

berkontribusi sangat besar terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sejumlah adalah Rp159,86 miliar, selanjutnya sektor perdagangan besar maupun reparasi kendaraan sejumlah Rp38,93 miliar, dan disusul oleh sektor konstruksi dengan jumlah kontribusi Rp19 miliar. Kinerja sektor perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat bisa terlihat dari pertumbuhan proporsional (PPij) maupun pertumbuhan pangsa wilayah (PPWij). Kinerja sektor perekonomian tersebut memiliki kriteria, yaitu apabila pertumbuhan proporsional lebih dari nol ($PPij > 0$), maka pertumbuhan PDRB sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat cenderung cepat dibanding Provinsi Lampung, sedangkan apabila ($PPij < 0$) maka pertumbuhan PDRB sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat cenderung lambat dibanding Provinsi Lampung. Untuk pertumbuhan pangsa wilayah, apabila di atas nol ($PPWij > 0$), berarti sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat mampu berdaya saing dengan Provinsi Lampung, sedangkan apabila ($PPWij < 0$) maka sektor perekonomian Kabupaten Pesisir Barat belum mampu berdaya saing dengan Provinsi Lampung.

Data Tabel 2, terlibat bila pertumbuhan keseluruhan (PNij) berpengaruh terhadap sektor pertanian di Kabupaten Pesisir Barat dengan hasil positif. Perihal ini diakibatkan PDRB yang berkontribusi sejumlah Rp 159,86 miliar atau berkontribusi sejumlah 50,4% terhadap seluruh sektor perekonomian. Pengaruh pertumbuhan proporsional (PPij) sektor pertanian berefek negatif: tumbuh kembang PDRB sektor pertanian di Kabupaten Pesisir Barat lebih lambat 7,13% atau 105,95 miliar dibanding pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Lampung. Pengaruh pertumbuhan pangsa wilayah (PPWij) sektor pertanian berefek negatif. Perihal ini memperjelas bila sektor pertanian di Kabupaten Pesisir Barat bisa bersaing dengan persentase sejumlah 6,31% atau di bawah sektor pertanian di Provinsi Lampung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terdapat 9 (sembilan) sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Barat yang berperan sebagai sektor basis dengan nilai LQ di atas 1. Sektor tersebut terbagi atas sektor pertanian kehutanan maupun perikanan; perdagangan besar maupun reparasi kendaraan, sektor informasi maupun komunikasi, real estate, jasa perusahaan, administrasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan aktivitas sosial maupun sektor jasa lain. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sejak tahun 2018 hingga 2022 memengaruhi peningkatan PDRB Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan 10,76 persen dengan jumlah Rp 316,72 miliar dengan sektor pertanian kehutanan maupun perikanan yang berkontribusi tertinggi sejumlah Rp159,86 miliar.

Saran

Diharapkan pemerintah daerah melakukan analisis mendalam terkait potensi dan keunggulan sektor perekonomian di tiap wilayah, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, identifikasi potensi ini menjadi dasar untuk pengembangan sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Pertanian. 2003. Komoditas Unggulan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pesisir Barat. 2015. *Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*.
- BPS Kabupaten Pesir Barat. 2022. Kabupaten Pesir Barat dalam angka 2022. *Publikasi*. BPS Kabupaten Pesir Barat. Provinsi Lampung.
- BPS Kabupaten Pesir Barat. 2021. Kontribusi sektor pertanian. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Provinsi Lampung.
- BPS Provinsi Lampung. 2022. Provinsi Lampung dalam angka 2022. *Publikasi*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- Faqih, A. 2021. Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*,

7(4): 550-559.

- Hamzah, L.M, dan Agustin, E. 2020. Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal (Kabupaten Pesisir Barat). *JEP*, 9(3): 165-175.
- Nurafiah, S., Lestari, E.K., dan Komariyah, S. 2020. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kawasan Minapolitan Provinsi Jawa Timur. *JEP*, 9 (1) 9-14.
- Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 mengenai Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
- Putra, A.N. 2013. *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta.
- Srivani, dkk. 2018. Analisis Potensi Ekonomi Dalam Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. *JEP*,7 (3): 325-340.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional. Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Kabupaten Pesisir Barat mulai memisahkan diri dari Kabupaten Lampung.
- Wahyuningtyas. 2013. Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB. *Jurnal Gaussian*, 2 (3):219-228.
- Weliza, Hudoyo, A., dan Affandi, M. I. 2022. Analisis Sektor Unggulan Untuk Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Pesawaran. *JFA*, 6(1): 79-92.